

KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SULAWESI UTARA

Oleh :

DELLY TAIDY

email: delly.nayla@gmail.com

**Pembimbing: 1. Dr.dra. Joyce J. Rares, MSi.
2. Drs. Joorie M. Ruru, MSi.**

Abstract

Environment Agency North Sulawesi governor is the element job aid in carrying out duties and functions of guidance, coordination and technical services in environmental management. To carry out the duties and functions set out policies/programs and activities undertaken. Issues to be addressed in this study is how the performance of the organization Environmental Agency of North Sulawesi in implementing the policy/program/activity has been established.

This study uses qualitative methods. In this study, the performance is defined as the level of success or achievement of the implementation of the policy/program/activity has been established in the strategic planning of the organization. Level of performance or the success seen through five indicators, namely: effectiveness, efficiency, responsiveness, transparency, and accountability.

Results showed: (1) the level of effectiveness achieved is well seen from the implementation of the program/activity has been established, and the level of realization or achievement of planned output targets, (2) the level of efficiency is better seen from the use of budget/funding and human resources; (3) the level of responsiveness is better seen from the alignment of programs and activities adopted/implemented with environmental issues and the needs/interests of the community, (4) the level of transparency is seen both ease of access to the necessary information society, as well as the openness and clarity of information available or given, and (5) the level of accountability is a good views of accountability to the public or stakeholder institutions on the performance of the policy/program/activities undertaken or accomplished.

Based on the results of these studies conclude that the performance of the Provincial Environmental Agency in carrying out its duties and functions related to the development, coordination and technical services in environmental management, showing good results.

Conclusions based on these results it is suggested that, with the increasing environmental problems in North Sulawesi it should be anticipated by BLH with established programs/activities more and more effective. In this regard the budget/funding allocated to North Sulawesi BLH needs to be improved/added.

Keywords: organizational performance, policies/programs/activities of environmental management.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Peranan birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang

Dasar 1945. Karena itu upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi terus dilakukan seiring dengan reformasi di bidang-bidang lainnya. Reformasi birokrasi yang telah dan terus dilakukan sekarang ini meliputi baik aspek organisasi maupun aspek manajemen pemerintahan. Reformasi birokrasi pada aspek organisasi adalah penataan kembali organisasi dari birokrasi itu sendiri; sedangkan reformasi pada aspek manajemen pemerintahan dilakukan dengan penyempurnaan pengelolaan sumber daya aparatur birokrasi (meliputi: sistem rekrutment, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karier, sistem penggajian, sistem penilaian kinerja), penyempurnaan pengelolaan keuangan (meliputi: sistem penganggaran, sistem pertanggungjawaban keuangan), penyempurnaan pengelolaan sarana dan prasarana (sistem pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan); dan penyempurnaan prosedur kerja (hubungan kerja, koordinasi).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, BLH Propinsi Sulawesi Utara dalam Perencanaan Strategik-nya 2010-2015 telah menetapkan tujuan kebijakan/program/kegiatan prioritas yaitu: (1) pemeliharaan dan pengembangan potensi alam daerah untuk menjadi warisan dunia, (2) peningkatan kualitas pegelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, (3) peningkatan pemahaman masyarakat tentang adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim secara intensif, (4) pementapan peran pelaku bisnis dalam perekonomian, (5) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah, (6) perlindungan kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan, dan (7) peningkatan kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Sedangkan sasaran kebijakan/program/kegiatan prioritas adalah: (1) terwujudnya pelestarian kawasan konservasi (taman nasional, cagar alam, taman wisata alam), (2) terlaksananya program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, (3) terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus, (4) terlaksananya peningkatan kualitas pengelolaan SDA, (5) terwujudnya kerjasama internasional terkait perubahan iklim, (6) terpantaunya DAS, (7) terkendalinya lahan kritis, kepunahan kekayaan hayati, dan alih fungsi hutan serta kebakaran hutan, (8) terpantaunya ekosistem teluk tomini, teluk manado, pulau-pulau kecil dan terluar.

Dari prasurvei yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan/program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran BLH Propinsi Sulawesi

Utara tersebut ternyata belum optimal dan belum memberikan hasil maksimal, yang disebabkan oleh beberapa kendala atau kelemahan, antara lain: (1) anggaran yang tersedia pada setiap tahun anggaran belum seimbang dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, (2) sarana dan prasarana kerja belum tersedia secara memadai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, (3) kapasitas kerja belum seimbang dengan kompleksitas pekerjaan, (4) koordinasi antara instansi terkait belum optimal, (5) masih terbatasnya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kendala atau kelemahan tersebut apabila tidak dapat diatasi secara efektif tentu akan berdampak pada tidak terwujudnya kinerja maksimal sebagaimana yang direncanakan.

Bertolak dari kenyataan dan beberapa kelemahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji “Kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang hendak dijawab dan dikaji dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi kebijakan/program yang telah ditetapkan.

Dengan mengetahui hal tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah atau memperkaya hasil-hasil penelitian di bidang kinerja organisasi pemerintah, sehingga dengan demikian diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan konsep pengukuran kinerja organisasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah Propinsi Sulawesi Utara terutama Badan Lingkungan Hidup yaitu

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan ataupun tindakan-tindakan peningkatan kinerja organisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian "*performance*". Ada pula memberikan pengertian *performance* sebagai "hasil kerja" atau "prestasi kerja" (Handoko, 2001). *Performance* juga sering diartikan sebagai "penampilan", "unjuk kerja", "prestasi" (Keban, 2008). Dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary (dalam Keban, 2008), istilah *performance* ini menunjukkan "*the execution or fulfillment of a duty*" (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau "*a person's achievement under test conditions, etc.* (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dan sebagainya). Secara umum kinerja diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "*the degree of accomplishment*" (Rue dan Bryas dalam Yuosa, 2002)

Terkait dengan konsep kinerja, Rummler dan Brache (dalam Sudarmanto, 2009) mengemukakan ada tiga level kinerja, yaitu:

1. Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil pada level atau unit analisis organisasi. Kinerja pada level organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi.
2. Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Kinerja pada level proses ini dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses.
3. Kinerja individu/pekerjaan; merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.

2.2 Konsep Pengukuran Kinerja Organisasi

Whittaker dalam bukunya "*The Government Performance Result Act of 1993*" (dalam LAN dan BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan

untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam *Reference Guide, Province Ofalberta, Canada* (LAN dan BPKP, 2000) disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berperan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi instansi pemerintah mencakup indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Indikator *input* ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Indikator proses, adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan dan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
- c. Indikator keluaran (*outputs*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.
- d. Indikator hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan; dengan kata lain indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
- e. Indikator manfaat (*benefits*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini menggambarkan manfaat yang dikeluarkan dari indikator hasil, atau menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran bisa diselesaikan dan bisa berfungsi dengan optimal.
- f. Indikator dampak (*impacts*), adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan.

Dwiyanto, dkk (2002) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja organisasi harus mengkaitkannya dengan misi dan tujuan organisasi, dalam hal ini indikator kinerja harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi publik tersebut. Dengan pendekatan ini maka menurut Dwiyanto (2002) akan ada lima aspek indikator kinerja organisasi yang komprehensif, yaitu:

- a. Produktivitas; dengan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan.
- b. Kualitas layanan; dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan.
- c. Responsivitas; dengan mengukur kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas; menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas; dengan mengukur seberapa besar kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para *stakeholders*.

Dari beberapa pendapat di atas jelaslah bahwa banyak indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk pengukuran atau penilaian kinerja organisasi publik/pemerintah terutama organisasi pelayanan publik, antara lain adalah: efisiensi dan efektivitas, daya tanggap atau responsivitas, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui/mengukur kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara, maka

penelitian ini lebih memungkinkan apabila tingkat eksplanasi menggunakan metode kualitatif.

Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Moleong (2006) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.2 Definisi Konsepsional Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsepsional dan definisi operasional. Dalam definisi konsepsional, peneliti berusaha menggambarkan batasan dari variabel yang hendak diteliti.

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja badan lingkungan hidup propinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini kinerja didefinisikan secara konsepsional sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik organisasi. Tingkat keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator yaitu: efektifitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

3.3 Sumber Data (Informan)

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal.

Adapun sumber data/informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data terakhir jumlah pegawai sebanyak 47 orang PNS. Dari jumlah pegawai tersebut diambil beberapa orang sebagai sumber data/informan dari unsur pejabat struktural yaitu Sekretaris (1 orang), Kepala Bidang (4 orang), Kepala Sub Bidang (4 orang), dan dari unsur pegawai

staf/pelaksana (2 orang), sehingga jumlah keseluruhan informan ada sebanyak 11 orang. Pada keadaan tertentu informan diminta untuk menunjuk orang lain yang diyakininya dapat memberikan informasi yang diperlukan.

3.4 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode tersebut karena beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2006).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview). Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dari responden/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman yang telah dipersiapkan lebih dahulu (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).
2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia di lokasi penelitian yakni Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara, terutama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena nyata yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Data hasil observasi ini merupakan pendukung data primer hasil wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002). Menurut kedua penulis ini bahwa model analisis interaktif memungkinkan peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada verifikasi atau penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Tentang Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Propinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Uraian Tugas Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut disebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kinerja organisasi Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi tersebut didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik organisasi. Tingkat keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan dengan

beberapa indikator seperti efektifitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian tentang kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan, koordinasi dan pelayanan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi Utara, dilihat dari lima indikator yaitu efektifitas, efisiensi, responsivitas, tranparansi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan:

1. Tingkat efektifitas adalah baik dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan tingkat realisasi atau capaian target hasil yang direncanakan.
2. Tingkat efisiensi adalah baik dilihat dari penggunaan anggaran/dana dan sumberdaya manusia (pegawai).
3. Tingkat responsivitas adalah baik dilihat dari tingkat keselarasan program dan kegiatan yang ditetapkan/dilaksanakan dengan permasalahan lingkungan hidup serta kebutuhan/kepentingan masyarakat.
4. Tingkat transparansi adalah baik dilihat kemudahan masyarakat mengakses informasi yang diperlukan, serta keterbukaan dan kejelasan informasi yang tersedia atau diberikan.
5. Tingkat akuntabilitas adalah baik dilihat dari pertanggungjawaban kepada masyarakat luas atau lembaga-lembaga *stake holders* tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan atau dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pembinaan, koordinasi dan pelayanan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup, menunjukkan hasil yang baik.

5.2 Saran

1. Walaupun kinerja yang dicapai sudah baik, namun dengan makin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup di Propinsi Sulawesi Utara maka harus dapat diantisipasi dengan menetapkan program/kegiatan yang lebih banyak dan lebih efektif.
2. Untuk mendorong peningkatan kinerja seiring dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup, maka anggaran/dana yang dialokasikan untuk Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara perlu ditingkatkan/ditambah. Selain itu, sarana dan prasarana kerja juga perlu ditambah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Jakarta.
- Armstrong, M. 2004, *Performance Management*, terjemahan, Yogyakarta, Tugu Publisher.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Dessler, G., 1996, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, terjemahan, Prenhalindo, Jakarta.
- Dunn William, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, terjemahan, UGM-Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukann dan Kebijakan UGM.
- Echols J. dan Hasan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gibson, L.J. dan Ivancevich, D. 1998, *Organisasi: Perilaku – Struktur – Proses*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Gomes, F.C. 1999, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Handoko, H.T. 2001, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta, BPFE-UGM.